

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, perencanaan alokasi dana desa dilakukan pada akhir tahun melalui musyawarah pembangunan desa atau yang disebut MusrembangDes. Pertama-tama musyawarah dilakukan ditingkat RT. Rapat RT dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat dan selanjutnya akan dibahas dalam Musrembangdes tingkat desa. Rapat pada ditingkat desa, semua usulan-usulan dari masyarakat dipilih lagi dengan skala prioritas maksudnya kegiatan yang sangat penting yang akan dilaksanakan. MusrembangDes ditingkat desa dihadiri oleh Camat Grogol, Kepala Desa Banaran, Kepala Dusun, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) beserta anggota., Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) beserta anggota, Ketua-ketua RT, Kepala Dusun dan aparat Pemerintah Desa. Pada tahap pelaksanaan, Semua dusun dan RT ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tetapi hanya RT yang dimana kegiatan itu dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan antara lain: Pembuatan saluran air RT 06 RW 04, rehab balai desa, Pembuatan Tempat Posyandu Rw II, pembuatan gorong-gorong RT 02 RW 01, pengaspalan jalan RT 05 rw 08, perbaikan gedung sekolah TK Pertiwi dan pembangunan pagar makam RT 07 RW 01. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini sangat dibutuhkan karena masyarakat dapat memaksimalkan pembangunan desa. Pada tahap pengawasan, dalam tahap pengawasan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah Ketua BPD dan pemegang proyek kegiatan pembangunan. Kepala dusun dan ketua RT juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan desa baik mengawasi agar memaksimalkan hasil pembangunan Desa.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa Banaran dalam mengelola sumber keuangan desa meliputi Kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat yang mengakibatkan pembangunan menjadi lambat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan adanya rapat suatu kegiatan pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kegiatan alokasi dana desa. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dibandingkan ikut serta dalam pembangunan desa. tidak adanya tenaga ahli dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa, mungkin dalam kata lain pegawai Desa Banaran kurang berkompeten dan perlu adanya pelatihan. Kemudian ketentuan yang diberikan Pemerintah Kecamatan dalam pelaporan keuangan cukup merepotkan belum ditambah lagi peraturan yang selalu berubah. namun terdapat pula pendorong dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Banaran. Cara mengatasi permasalahan ini yaitu masih terjalinnya hubungan yang baik antar desa, dan yang lebih penting adalah kekompakan dan kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh seluruh aparat Desa Banaran dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

B. Saran

1. Bagi pihak aparat desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Alokasi Dana Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan

tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan atau usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.